

TINJAUAN ATAS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TRANSISI SIPD KE SIPD RI PADA BPKAD MOJOKERTO

Ullifah Yanti¹; Junaidi²

Program Studi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura^{1,2}
Email : ullifahyanti@gmail.com¹; injunaidi@trunojoyo.ac.id²

ABSTRAK

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait keuangan daerah, pembangunan, serta informasi pemerintahan daerah secara lebih akuntabel, adaptif, dinamis, responsive dan inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh bidang di BPKAD Mojokerto telah menggunakan SIPD RI, Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Mojokerto dalam mengimplementasikan SIPD RI, Apa saja tantangan yang dihadapi oleh BPKAD Mojokerto selama transisi ke SIPD RI, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPKAD Mojokerto untuk mengatasi hambatan dalam implementasi SIPD RI. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa seluruh bidang di BPKAD Mojokerto telah menerapkan SIPD RI dengan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui program sosialisasi. Untuk faktor pendukung seperti Fasilitas di BPKAD Mojokerto sudah cukup memadai untuk mendukung penggunaan SIPD RI, tetapi untuk Sumber Daya Manusia belum cukup memadai karena adanya sebagian pegawai yang belum memahami SIPD RI.

Kata kunci : Sistem Informasi; Pemerintah Daerah; SIPD; Evaluasi Kebijakan

ABSTRACT

The system for Regional Government Information (SIPD RI) of the Republic of Indonesia is a system used to manage data and information related to regional finances, development, and governance in a more accountable, adaptive, dynamic, responsive, and innovative. This research aims to determine whether all departments within BPKAD Mojokerto have implemented SIPD RI, assess the readiness of Mojokerto Local Government in implementing SIPD RI, identify the challenges faced by BPKAD Mojokerto during the transition to SIPD RI, and explore the efforts made by BPKAD Mojokerto to overcome these implementation obstacles. The research methodology employed is qualitative descriptive, utilizing data collection techniques through interviews. The research findings indicate that all departments within BPKAD Mojokerto have adopted SIPD RI with support from the Local Government through socialization programs. Facilities at BPKAD Mojokerto are deemed adequate to support the use of SIPD RI. However, human resources readiness remains inadequate due to some employees' lack of understanding of SIPD RI.

Keywords : Information Systems; Regional Government; SIPD; Policy Evaluation

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, perkembangan sistem informasi terjadi dengan cepat dan semakin diperlukan oleh berbagai sektor. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi,

berbagai aspek kehidupan manusia mengalami perubahan signifikan. Perkembangan sistem informasi ini ditandai dengan munculnya berbagai aplikasi yang memudahkan banyak pekerjaan, membuat seluruh kegiatan yang menggunakan teknologi menjadi lebih cepat dan efektif. Kecepatan perkembangan teknologi informasi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

Kemajuan teknologi ini mendorong berbagai sektor pemerintah untuk memanfaatkan sistem, sehingga dengan menggunakan teknologi kesalahan dalam penyampaian informasi dapat diminimalkan dan pelaporan keuangan menjadi lebih andal serta transparan (Sari & Abdullah, 2023). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Laporan keuangan digunakan oleh entitas sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat. Pemerintah perlu menyajikan laporan keuangan yang menyediakan informasi keuangan dengan kualitas yang tinggi (Pembayun, 2023). Pemerintahan di anggap baik jika terpenuhinya prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi publik, terutama dalam hal pelaporan keuangan akuntansi (Putri & Akbar, 2022). Salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menerapkan pemerintahan yang baik ini adalah melalui *Electronic Government* (Novita et al., 2023).

Perkembangan sistem informasi mendorong pemerintah untuk meluncurkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Permendagri ini secara khusus mengatur tentang penerapan SIPD, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan tata cara penyelenggaraan SIPD di tingkat daerah. SIPD merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk alat pendukung oleh pemerintah daerah sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dalam implementasi berbagai peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah. (Manoe, Koten, & Rozady, 2023).

Penggunaan aplikasi berbasis website ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan serta mempercepat proses pengawasan serta evaluasi layanan publik. Namun, penerapan program ini tidaklah sederhana dan memerlukan kerjasama antara berbagai instansi yang terkait. Meskipun SIPD cukup membantu para pegawai pemerintah, tetapi terjadi banyak hambatan yang muncul sehingga dapat memperlambat

tugas pemerintah. Beberapa kendala yang muncul saat mengoperasikan SIPD yaitu masalah jaringan, kendala teknis dalam aplikasi, dan lainnya (Arif & Firmansyah, 2024). Karena masalah ini maka pada tahun 2023 kemendagri membuat sebuah inovasi baru dengan membuat Sistem informasi baru yang dinamakan dengan SIPD RI yang telah di uji coba pada tahun anggaran 2023.

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto, transformasi dari SIPD ke SIPD RI telah dilakukan, implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD RI) telah diterapkan di semua bidang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Meskipun SIPD RI telah diterapkan secara menyeluruh di setiap bidang, banyak kendala yang masih sering terjadi. Kendala-kendala ini memerlukan perhatian serta solusi agar tujuan optimalisasi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam bertransisi ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), dengan studi kasus yang berfokus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah, yaitu apakah seluruh bidang di BPKAD Mojokerto telah menggunakan SIPD RI, bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Mojokerto dalam menerapkan SIPD RI, tantangan apa saja yang dihadapi oleh BPKAD Mojokerto selama transisi ke SIPD RI, serta bagaimana upaya BPKAD Mojokerto dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi SIPD RI.

Topik tinjauan implementasi SIPD telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti Pramana, Yap, Rukmini, Mahmudi, dan Agustina (2023) dengan fokus penelitian di BPKAD Nganjuk, Adisi dan Sadad (2022) dengan fokus penelitian di BPKAD Indragiri Hulu, Nasution dan Nurwani (2021) dengan fokus penelitian di BPKAD Medan, dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, mayoritas membahas mengenai SIPD versi lama sedangkan penelitian mengenai SIPD RI masih sedikit dilakukan. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus objek penelitian ini dilakukan di BPKAD Kabupaten Mojokerto, yang belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya, serta penelitian ini lebih berfokus meneliti mengenai SIPD RI yang penelitiannya masih sedikit dilakukan. Oleh karena itu,

penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai penggunaan SIPD RI serta dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan SIPD RI.

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi pembaca serta peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai SIPD RI. Penelitian ini dapat menjadi studi kasus yang bermanfaat bagi pemerintah daerah lain yang ingin melakukan transisi ke SIPD RI, sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman BPKAD Mojokerto.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persiapan pemerintah daerah dalam menerapkan aplikasi SIPD RI pada tahun 2024, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Horn pada tahun 1975. Teori tersebut, yang dikenal dengan "Model Implementasi Kebijakan," menggunakan pendekatan penerapan kebijakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan merupakan proses di mana keputusan kebijakan yang telah dirancang diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan operasional yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Model ini berfokus pada beberapa kunci yang mempengaruhi proses ini seperti kejelasan kebijakan, karakteristik agen implementasi, sumber daya yang tersedia, lingkungan eksternal, komunikasi antar-organisasi, dan sikap pelaksana kebijakan.

Sistem Informasi

Secara umum, sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyimpan, mengelola, mengumpulkan, memproses, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi atau entitas. Sistem informasi yaitu sebuah sistem yang dirancang oleh manusia, terdiri dari berbagai komponen dalam suatu entitas atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai berbagai temuan yang dapat menghasilkan informasi (Arifin et al., 2022).

Menurut Fauzi (2017) sistem informasi terdiri dari gabungan orang-orang, prosedur, fasilitas, media, teknologi, dan pengendalian yang bertujuan untuk memproses transaksi rutin tertentu, membangun jalur komunikasi penting, memberi peringatan

kepada manajemen dan pihak lainnya tentang kejadian-kejadian internal dan eksternal yang signifikan baik dari dalam maupun luar yang memberikan landasan untuk pengambilan keputusan.

Sistem informasi dalam suatu organisasi mempunyai manfaat yang luas dan signifikan. Dari segi peningkatan kualitas kepuasan pelanggan, peningkatan kualitas keputusan dan peningkatan efisiensi operasional. Sistem informasi mempunyai peran penting dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Karena alasan tersebut maka investasi dalam sistem informasi yang tepat serta manajemen yang efektif dapat menjadi kunci kesuksesan dan daya saing organisasi di era digital saat ini.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang bermanfaat untuk mengatur pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara terstruktur untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan manajemen dan pimpinan di perusahaan, serta mempermudah dalam pengelolaan perusahaan (Endaryati, Wahyuning, & Mawardani, 2021).

Sistem informasi akuntansi menjadi bagian penting yang sangat dibutuhkan oleh manajemen perusahaan, terutama terkait dengan pencatatan data keuangan sebuah perusahaan. Dalam suatu perusahaan, sistem ini berfungsi untuk mengoptimalkan pengolahan informasi akuntansi secara terstruktur, yang bermanfaat bagi pihak dalam maupun luar perusahaan. Selain itu, sistem informasi akuntansi berperan penting dalam mendukung perkembangan dan kemajuan perusahaan (Lestari & Amri, 2020).

Sistem ini memiliki peran penting dalam memastikan semua pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan benar dan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan akurasi serta efisiensi pelaporan keuangan. Selain itu, sistem informasi akuntansi membantu dalam menyediakan wawasan yang diperlukan untuk perencanaan strategis, memantau kinerja keuangan perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan akurat berdasarkan data keuangan yang ada.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan manajemen

informasi yang mengintegrasikan data keuangan daerah, informasi pemerintah daerah dan pembangunan daerah, untuk digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dibuat sebagai alat penyusunan, pemantauan, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara elektronik yang terintegrasi antar daerah (Tjandra, Harjanto, Nurim, & Wijaya, 2024).

Untuk memudahkan komunikasi informasi pemerintah daerah kepada masyarakat, Menteri Dalam Negeri mengatur pengintegrasian informasi pemerintahan daerah ke dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, pada pasal 6 ayat (1) dan (2), SIPD dibentuk untuk menyediakan layanan informasi pemerintahan daerah yang terhubung dan terintegrasi secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), SIPD dapat diakses melalui situs web resmi Kementerian Dalam Negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan bersumber dari materi-materi non-angka atau bukan dalam bentuk data numerik. Data ini dapat berasal dari wawancara, memo catatan, dan dokumen resmi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang kompleks, proses sosial, dan konteks spesifik tanpa memerlukan perlakuan eksperimen. Hasil dari penelitian kualitatif ini adalah penyajian informasi atau penjelasan yang bersifat faktual berdasarkan pengamatan, tanpa melakukan manipulasi data.

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan metode pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif ini digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, termasuk aturan-aturan yang berlaku, relasi-relasi, aktivitas, proses yang tengah berlangsung, pandangan-pandangan, serta dampak-dampak dari suatu fenomena. Peneliti tidak melakukan perubahan atau campur tangan yang signifikan terhadap fenomena atau lingkungan yang menjadi objek penelitian. Penelitian deskriptif lebih berfokus pada pengamatan, pengumpulan data, dan deskripsi dari objek penelitian sesuai dengan situasi yang ada, tanpa mengintervensi atau mengubahnya secara substansial.

Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan informan. Informan, yaitu orang-orang

yang bisa memberikan sebuah informasi yang tepat dan akurat dan bertanggung jawab untuk menangani aplikasi SIPD RI di BPKAD Kabupaten Mojokerto. Sedangkan data sekunder di dapat dari buku panduan SIPD RI dari BPKAD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Pemerintah Daerah Mojokerto dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mojokerto seluruhnya telah siap dalam penggunaan SIPD RI, sesuai wawancara dengan Ibu Ririn Yulianti selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi yaitu “Semua bidang sudah menggunakan SIPD RI, untuk SIPD dan SIPD RI keduanya beda vendor, SIPD sudah tidak dipakai lagi karena kebijakan tahun 2024 pemakaian wajib hanya menggunakan SIPD RI”. Begitu pula hasil wawancara dari Bapak Imam selaku pegawai bagian perbendaharaan daerah menyebutkan bahwa “Seluruh bidang yang berada di BPKAD sudah menggunakan SIPD RI baik untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan maupun pembangunan daerah.”

Semenjak penggantian SIPD ke SIPD RI, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mojokerto tidak langsung beralih secara tiba-tiba, hal ini dikarenakan banyak pegawai yang belum paham mengenai sistem SIPD RI, hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Ririn Yulianti selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi yaitu “Kami semua belajar sendiri dengan mandiri seperti lewat google dan youtube selain itu kami melakukan konsultasi ke Pusdatin Kemendagri”. Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku pegawai BPKAD bagian perbendaharaan daerah juga mempunyai pendapat yang sama yaitu “Dalam hal ini untuk kesiapan mengimplementasikan SIPD RI di BPKAD dilakukan secara bertahap, para pegawai BPKAD juga diikut sertakan dengan pelatihan penggunaan aplikasi SIPD RI secara online melalui zoom meeting yang diadakan oleh kemendagri, selain itu beberapa perwakilan BPKAD dikirimkan langsung ke kantor Pusat kemendagri selaku pembuat aplikasi SIPD RI di Jakarta dalam hal konsultasi terkait masalah – masalah SIPD RI”.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelatihan dan pendampingan intensif, serta konsultasi dengan pihak terkait, sangat diperlukan untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan mampu mengoperasikan SIPD RI dengan baik. Pendekatan bertahap yang melibatkan pembelajaran mandiri, pelatihan online, dan

konsultasi langsung menunjukkan upaya serius BPKAD Mojokerto dalam mengadopsi sistem baru ini.

Faktor pendukung penggunaan SIPD RI di BPKAD Mojokerto:

- Sumber Daya Manusia

Di BPKAD Mojokerto sumber daya manusia sudah mendukung untuk menggunakan SIPD RI, namun terbatas sesuai tugas dan tanggung jawabnya, di BPKAD Mojokerto masih banyak pegawai yang belum memahami semua menu-menu di SIPD RI. Tetapi untuk saat ini mayoritas pegawai BPKAD sudah berusaha untuk mengikuti berbagai sosialisasi agar menguasai SIPD RI tanpa hambatan lagi.

- Infrastruktur

Pada BPKAD Mojokerto kelengkapan sarana dan prasarana telah memenuhi standar untuk mendukung implementasi SIPD RI ini mulai dari fasilitas komputer yang digunakan di BPKAD Mojokerto semuanya sudah memakai windows 10 keatas dan memakai spesifikasi menengah keatas yg memungkinkan untuk bisa mengakses laman SIPD RI dengan lancar, dimana SIPD RI ini membutuhkan resource juga browser versi terbaru untuk bisa masuk ke halamannya. Untuk jaringan wireless di BPKAD juga sudah sangat banyak yang bisa dipakai untuk kebutuhan sistem operasional kantor, juga didukung dengan jaringan gratis yg disediakan dari PEMKAB dengan konektivitas stabil dan cepat, begitu pula dengan infrastruktur meja kerja dan kursi yang digunakan di BPKAD termasuk nyaman digunakan yang membuatnya menjadi pendukung tambahan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi SIPD RI.

Tantangan yang dihadapi oleh BPKAD Mojokerto dalam transisi SIPD ke SIPD RI

SIPD RI diciptakan sebagai pengganti SIPD, transisi ini dikarenakan SIPD mempunyai banyak kendala dalam penggunaannya sehingga pemerintah menginginkan perubahan dengan harapan tidak terjadi hambatan yang sama seperti pada SIPD sebelumnya, menurut hasil wawancara dengan Bapak Imam “tantangan transisi ini didapatkan langsung dari internal atau pegawai BPKAD sendiri dimana mayoritas pegawai BPKAD masih belum mahir dalam mengoperasikan komputer sehingga mempengaruhi kecepatan kinerja pegawai itu sendiri dalam memahami transisi SIPD RI ini.” Tidak hanya tantangan transisi saja yang dialami oleh pegawai, tetapi banyak juga tantangan yang dihadapi saat penggunaan SIPD RI ini “ Tantangan penggunaan SIPD

RI ini tetap sama dengan SIPD yang lama, masalah serius didapatkan dari aplikasi SIPD RI itu sendiri, SIPD RI pada awal launching masih dalam tahap pengembangan sehingga penggunaan SIPD RI berjalan kurang efektif salah satunya yaitu lambatnya akses ke aplikasi itu sendiri karena server SIPD RI digunakan secara nasional sehingga harus siap bekerja 24 jam, selain itu seringkali kegagalan server SIPD RI dalam menanggapi permintaan pengguna juga menjadi masalah yg sering terjadi di BPKAD, membuat pekerjaan yang biasanya diselesaikan tepat waktu menjadi banyak membuang waktu kerja” begitulah hasil wawancara dengan Ibu Ririn Yulianti mengenai hambatan penggunaan SIPD RI.

Karena kelambanan dari SIPD RI ini membuat banyak pegawai yang mengeluh karena tugas tidak cepat terselesaikan. Keluhan ini tidak hanya datang dari pegawai pemerintahan yang sehari-hari menggunakan SIPD RI, tetapi juga dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses administrasi dan pelaporan keuangan.

Upaya BPKAD Mojokerto dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi SIPD RI

Dalam menghadapi hambatan – hambatan yang terjadi, BPKAD Mojokerto berusaha mengatasinya dengan banyak cara diantaranya:

- Perwakilan dari BPKAD diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi secara langsung terkait penggunaan SIPD RI ke kemendagri, kemudian diadakan bimbingan teknis baik untuk internal BPKAD maupun untuk skpd yang terkait guna menyalurkan ilmu yg sudah didapatkan. Hal ini dilakukan supaya BPKAD mempunyai Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam pengoperasian SIPD RI.
- Tersedia manual book yang bisa dijadikan buku pedoman bagi para pegawai dalam penggunaan SIPD RI.
- Untuk mengatasi masalah pusat server, BPKAD terus berupaya untuk menghubungi kantor kemendagri guna diadakan maintenance agar server bisa pulih kembali, hal ini dikarenakan masalah server sering terjadi yang menyebabkan lambatnya kinerja dari SIPD RI karena penggunaannya yang serentak di seluruh negeri.
- Pegawai BPKAD tetap melakukan pekerjaan dimalam hari, hal ini dilakukan agar pekerjaan cepat selesai dan pada malam hari server cenderung lebih cepat dibandingkan pada siang hari, selain itu para pegawai BPKAD terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pusdatin.

Dari banyak upaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi SIPD RI, BPKAD Mojokerto telah mengambil langkah-langkah yang komprehensif. Pendekatan ini menunjukkan upaya serius dan terencana dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai serta menjaga kinerja sistem agar tetap optimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto telah berhasil mengimplementasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) secara menyeluruh di berbagai bidang. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman bagi para pegawai yang harus beralih dari SIPD ke SIPD RI, serta masalah teknis terkait infrastruktur dan kinerja server SIPD RI yang sering lambat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, BPKAD Mojokerto telah melakukan langkah-langkah strategis, termasuk pelatihan intensif, konsultasi dengan pihak terkait, dan upaya teknis untuk memperbaiki kinerja sistem. Keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan upaya yang transisi ke SIPD RI, yang dapat menjadi panduan berharga bagi pemerintah daerah lain yang berencana mengadopsi sistem serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581>
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Arifin, N. Y., Borman, R. I., Ahmad, I., Tyas, S. S., Sulistiani, H., Hardiansyah, A., & Suri, G. P. (2022). *Analisa Perancangan Sistem Informasi*. Deli Serdang: Cendikia Mulia Mandiri.
- Asmawati, N., Suparman, S., & Gunawan, H. (2024). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1308–1314. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3376>
- Endaryati, E., Wahyuning, S., & Mawardani, M. P. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas Sebagai Pengendali Kas Dengan Metode Accrual Basis. *Jurnal Manajemen Informatika & Teknologi*, 1(1), 43–54. <https://doi.org/10.51903/mifortekh.v1i1.32>
- Fauzi, R. A. (2017). *Sistem informasi akuntansi (berbasis akuntansi)*. Sleman: Deepublish.

-
- Lestari, K. C., & Amri, A. M. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi Sia Sederhana dalam UMKM)* (1st ed.). Sleman: CV Budi Utama.
- Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. N. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sikka. *Jurnal in Create (Inovasi Dan Kreasi Dalam Teknologi Informasi)*, 9(1), 19–26.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Novita, R., Ningsih, R. A., Fiernanda, V., Sari, S. S., Usmaniyah, W., & Faisol, I. A. (2023). Aktivitas Pengisian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekterariat Daerah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 545–552. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i4.448>
- Pembayun, F. (2023). Implementation of Financial Accounting System at The Regional Finance and Asset Management Agency of Banten Province. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 2(4), 451–459. <https://doi.org/10.54408/jabter.v2i4.195>
- Pradipta, R. S. (2023). Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd). *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–12.
- Pramana, A. C., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). Analisis penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ekuivalensi*, 9(1), 45–58.
- Putri, A. C. P., & Akbar, F. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 14–25.
- Riani, D., Putri, G. A. A., & Pratama, I. P. A. E. (2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar). *JITTER - Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, 2(3), 1–12.
- Sari, E. S., & Abdullah, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Desa Kabupaten Kaur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1386–1401. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3550>
- Tjandra, R., Harjanto, N., Nurim, Y., & Wijaya, N. R. (2024). The Determinants of Local Government Information Systems Effectiveness. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 13(3), 350–363.